



2019

LAPORAN REFORMASI BIROKRASI

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kemajuan dan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Intansi Pemerintah, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Perlu disadari bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi ini masih belum sepenuhnya sempurna. Masih terdapat tantangan terutama di dalam peningkatan akuntabilitas dan pelayanan kinerja aparatur serta pelayanan publik. Karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diperlukan sehingga Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dapat memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun- tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun 2019 ini dapat bermanfaat serta meningkatkan perbaikan manajemen pemerintahan berbasis kinerja dalam menyukseskan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. M. ABDUH M MATTALITTI, CES

Pembina Utama muda
NIP. 19601116 198912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Visi	7
1.2.2 Misi.....	7
1.2.3 Tugas Pokok	7
1.2.4 Fungsi	8
1.2.5 Susunan Organisasi	8
1.3 Sistematika	13
BAB II RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019	
2.1 Isu Permasalahan.....	14
2.2 Rencana Kerja.....	17
2.2.1 Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)	18
2.2.2 Penguatan Pengawasan	18
2.2.3 Penguatan Akuntabilitas Kinerja.....	19
2.2.4 Penguatan Kelenbagaan	19
2.2.5 Penataan Ketatalaksanaan.....	20
2.2.6 Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.....	21
2.2.7 Penguatan Peraturan Perundang-undangan	22
2.2.8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	22
BAB III PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019	
3.1 Realisasi Capaian.....	31
3.2 Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	35
3.2.1 Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)	35
3.2.2 Penguatan Pengawasan	36
3.2.3 Penguatan Akuntabilitas Kinerja	36

3.2.4	Penguatan Kelenbagaan	38
3.2.5	Penataan Ketatalaksanaan.....	38
3.2.6	Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	40
3.2.7	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	41
3.2.8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	41
3.3	Analisis Hasil	42
3.3.1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Bebas KKN	43
3.3.2	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat.	43
3.3.3	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi ..	45
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan.....	46
4.2	Rekomendasi.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengabungan dan Penghapusan UPT	3
Tabel 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi	17
Tabel 2.2 rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.....	23
Tabel 3.1 Realisasi Capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2019	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
Provinsi Jawa Timur	2
Gambar 1.2 Stuktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
Provinsi Jawa Timur	11
Gambar 1.3 Stuktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
Provinsi Jawa Timur dan UPT WS.....	12
Gambar 3.1 Renja UPG dan Sosialisasi tentang Gratifikasi	36
Gambar 3.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	37
Gambar 3.3 LKJIP Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
Provinsi Jawa Timur Perjanjian Kinerja Tahun 2019	37
Gambar 3.4 SOP Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi	
Jawa Timur (SWP)Perjanjian Kinerja Tahun 2019	39
Gambar 3.5 Website PPID Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
Provinsi Jawa Timur.....	40
Gambar 3.6 Website Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi	
Jawa Timur.....	42
Gambar 3.7 Instagram Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi	
Jawa Timur.....	42
Gambar 3.8 Twitter Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
Provinsi Jawa Timur	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dapat membawa perubahan besar terhadap kinerja pemerintah kepada masyarakat, “membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”. Reformasi Birokrasi yang dilakukan pada 8 (delapan) area perubahan yaitu manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN, penguatan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap responsivitas, transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur melaksanakan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap lima tahunan sampai dengan tahun 2025, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Pentingnya Reformasi Birokrasi kembali ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, dengan ditempatkannya Reformasi Birokrasi sebagai agenda pembangunan nasional, terutama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Di lingkungan , Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi didasarkan pada Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah melalui proses assesment sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diambil keputusan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Pengairan (Nomenklatur sebelum berlakunya UU 23 Tahun 2014) berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dengan level Dinas Daerah Tipe A dimana Kepala Dinas (Es. IIa) membawahi Sekretaris (Es. IIIa) dan 4 (empat) Bidang setingkat Eselon IIIa.



Gambar 1.1 Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang mulai berlaku efektif pada Tahun Anggaran 2017.

Mengingat rentang kendalinya yang cukup luas meliputi 38 Kabupaten/Kota seluas 47.779,975 km² wilayah daratan, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Kinerja Dinas PU Sumber Daya Air ditunjang dengan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di 6 (enam) kabupaten di Jawa Timur yaitu Bojonegoro, Kediri, Pasuruan, Pamekasan, Bondowoso, dan Lumajang.

Sebelum berlakunya Pergub Nomor 49 Tahun 2018, UPT Dinas berjumlah 10 (sepuluh) unit terdiri dari 9 (sembilan) UPT Kewilayahan dan 1 (satu) UPT Peralatan. Sehubungan dengan rasionalisasi Jumlah UPT Provinsi sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dilakukan penggabungan dan penghapusan UPT sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1.1 Penggabungan dan Penghapusan UPT

NO	PERGUB 107/2016	Wilayah Kerja	PERGUB 49/2018	Wilayah Kerja
1	UPT PSDA di Bojonegoro	Kab Tuban, Kab Bojonegoro, Kab Lamongan, Kab Gresik	UPT PSDA WS Bengawan Solo di Bojonegoro	Kab Tuban, Kab Bojonegoro, Kab Lamongan, Kab Gresik Kab Pacitan, Kab Ponorogo,

NO	PERGUB 107/2016	Wilayah Kerja	PERGUB 49/2018	Wilayah Kerja
2	UPT PSDA di Madiun	Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab/Kota Madiun, Kab Ngawi, Kab Magetan		Kab/Kota Madiun, Kab Ngawi, Kab Magetan
3	UPT PSDA di Kediri	Kab/Kota Kediri, Kab Trenggalek, Kab Nganjuk, Kab Jombang	UPT PSDA WS Brantas di Kediri Dihapus (menjadi	Kab/Kota Kediri, Kab Trenggalek, Kab Nganjuk, Kab Jombang
4	UPT PSDA di Malang	Kota Batu, Kab/Kota Malang, Kab/Kota Blitar, Kab Tulungagung	kordinator wilayah dengan tugas kewilayahan tetap) Dihapus (menjadi	Kota Batu, Kab/Kota Malang, Kab/Kota Blitar, Kab Tulungagung
5	UPT PSDA di Surabaya	Kota Surabaya, Kab/Kota Mojokerto, Kab Sidoarjo	kordinator wilayah dengan tugas kewilayahan tetap)	Kota Surabaya, Kab/Kota Mojokerto, Kab Sidoarjo

NO	PERGUB 107/2016	Wilayah Kerja	PERGUB 49/2018	Wilayah Kerja
6	UPT PSDA di	Kab Bangkalan, Kab	UPT PSDA WS	Kab Bangkalan, Kab
	Pame kasan	Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep	Madura - Bawean UPT PSDA WS Welang Pekalen	Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep Kab/Kota Pasuruan, Kab/Kota Probolinggo, Kec Lawang
7	UPT PSDA di Pasuruan	Kab/Kota Pasuruan, Kab/Kota Probolinggo	UPT PSDA WS Welang Pekalen	Kab/Kota Pasuruan, Kab/Kota Probolinggo, Kec Lawang
8	UPT PSDA di Lumajang	Kab Lumajang, Kab Jember	UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Kab Lumajang, Kab Jember, Kab Banyuwangi (Sebagian)
9	UPT PSDA di	Kab Situbondo, Kab	UPT PSDA WS	Kab. Malang (Sebagian) Kab Situbondo, Kab

NO	PERGUB 107/2016	Wilayah Kerja	PERGUB 49/2018	Wilayah Kerja
	Bondowoso	Bondowoso, Kab Banyuwangi	Sampean Setail	Bondowoso, Kab Banyuwangi
10	UPT Depo Peralatan	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sungai Orde 1 sd 5 WS Provinsi Tanggap Darurat Seluruh Wilayah Provinsi	Dihapus (dilaksanakan oleh PPK Depo Peralatan yang dijabat oleh Es IV di Bidang Sungai Waduk Pantai)	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sungai Orde 1 sd 5 WS Provinsi Tanggap Darurat Seluruh Wilayah Provinsi

Salah satu hal yang mendasari perubahan UPT ini adalah adanya pemahaman, dari Assessor pada saat itu, mengenai beban kerja UPT Dinas di Wilayah Sungai Kewenangan Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan 7 (Tujuh) Wilayah Sungai yang terdiri dari 2 (dua) Wilayah Sungai Kewenangan Pusat dan 5 (lima) Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi. Sedangkan Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota tidak ada di Provinsi Jawa Timur.

Wilayah Sungai dalam peraturan tersebut didefinisikan sebagai Kesatuan Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih

Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau – pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km². Sedangkan Daerah Aliran Sungai adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak – anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Beban Kerja UPT yang berkedudukan di Wilayah Sungai Pusat, ditetapkan pada saat itu, merupakan kegiatan operasi dan pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dengan menganggap kegiatan lingkup Sumber Daya Air lain yang bersifat kewilayahan bukan menjadi tanggung jawab Provinsi karena merupakan Kewenangan.

1.2.1 Visi

Visi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur adalah :”Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Menyeluruh, Terpadu Dan Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Jawa Timur Lebih Sejahtera ”.

1.2.2 Misi

- 1) Meningkatkan konservasi sumber daya air yang berkelanjutan
- 2) Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air secara adil untuk berbagai kebutuhan
- 3) Mengendalikan dan mengurangi resiko daya rusak air

Dalam penulisan aktualisasi ini penulis juga berpedoman dengan Misi Nomor 2 dari Provinsi Jawa Timur “ Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif , Mandiri, dan Bersaya Saing, Berbasis, Agrobisnis/agrindustri, dan industrialisasi.

1.2.3 Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pekerjaan umum dan tugas pembantuan.

1.2.4 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, maka Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

1.2.5 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2016, Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur No. 107 Tahun 2016, terdiri dari unsur-unsur :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja dibawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

C. Bidang Perencanaan Sumber Daya Air

Bidang Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyusun kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan sumber daya air.

D. Bidang Sungai, Waduk Dan Pantai

Bidang Sungai, Waduk dan Pantai mempunyai tugas menyusun kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sungai, Waduk dan Pantai.

E. Bidang Irigasi

Bidang Irigasi mempunyai tugas menyusun kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Irigasi

F. Bidang Bina Manfaat

Bidang Bina Manfaat mempunyai tugas menyusun kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bina manfaat.

G. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur memiliki 6 (Enam) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air (UPT PSDA) yaitu :

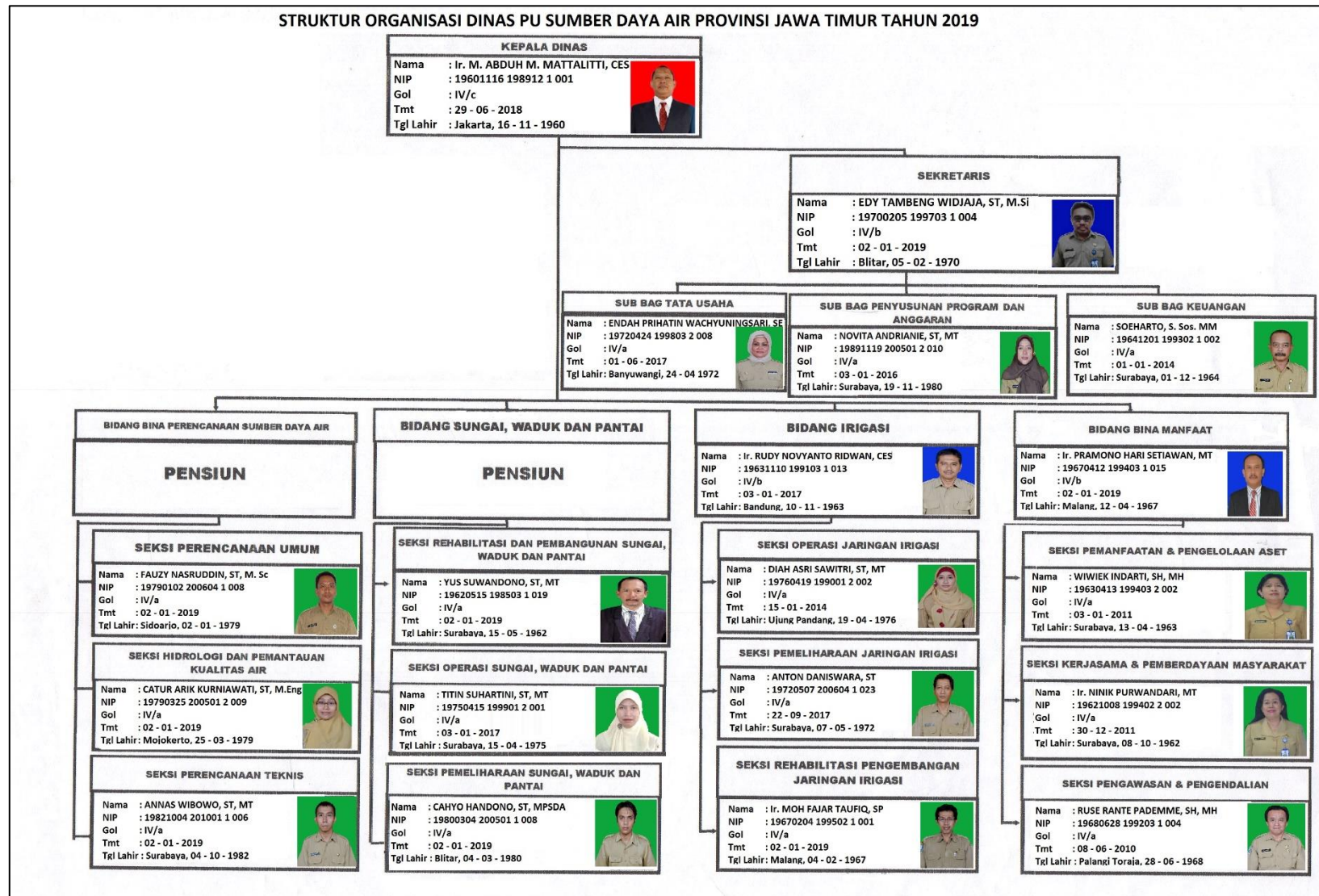
1. UPT PSDA di Kediri
2. UPT PSDA di Bojonegoro
3. UPT PSDA di Bondowoso
4. UPT PSDA di Lumajang
5. UPT PSDA di Pasuruan
6. UPT PSDA di Pamekasan

UPT PSDA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yakni pengawasan, pengkoordinasian pengelolaan sumber daya air dan sumber air serta urusan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

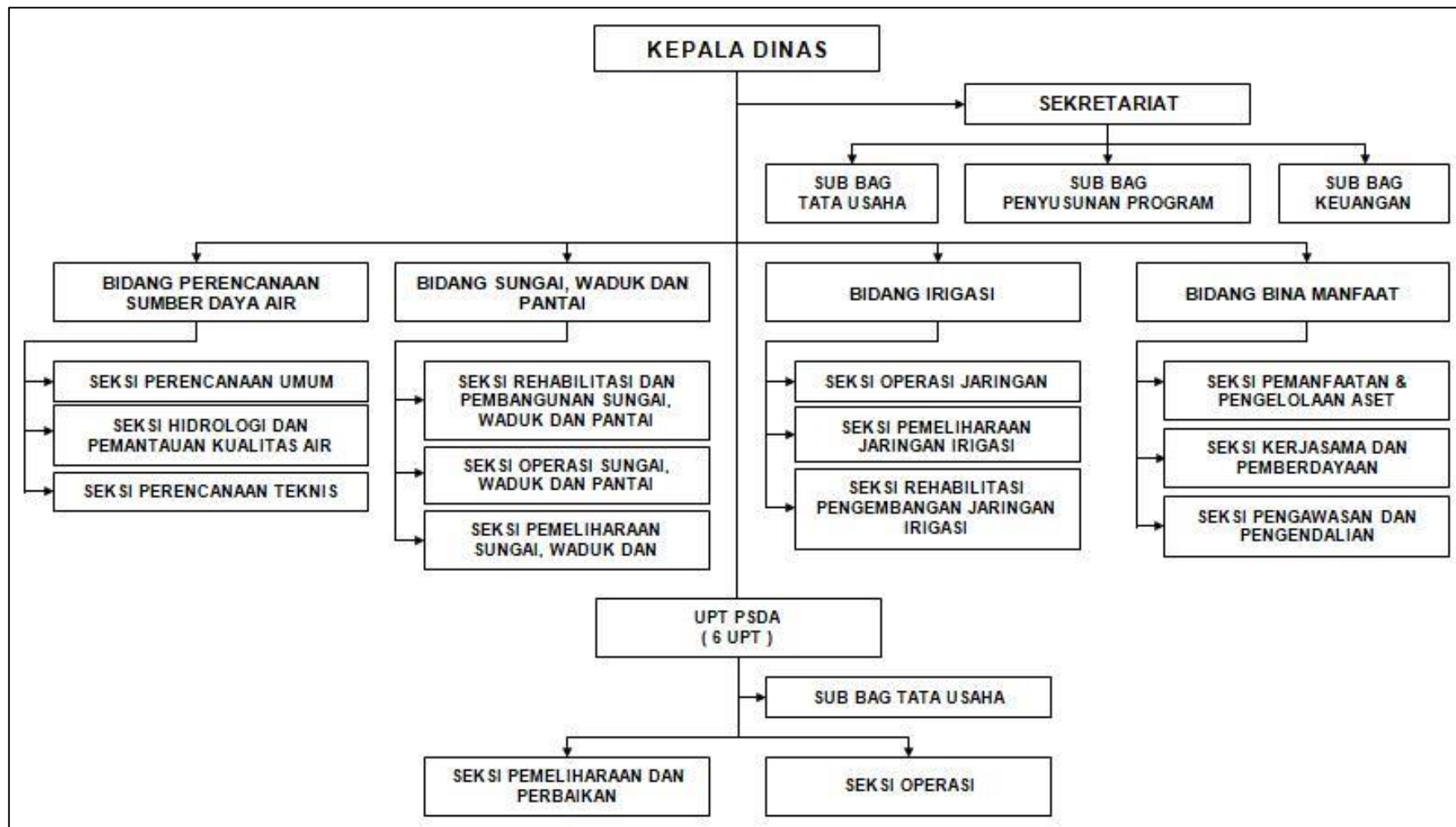
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, UPT PSDA mempunyai fungsi :

1. perencanaan dan pelaksanaan operasi di bidang pengelolaan sumber daya air,

2. pelaksanaan konservasi/pelestarian air dan sumber-sumber air,
3. pemeliharaan sumber-sumber air dan infrastruktur Sumber Daya Air,
4. pemantauan dan pengendalian banjir dan kekeringan,
5. pelaksanaan pemantauan, pengelolaan data kuantitas air, data kualitas air, debit air, data hidrologi dan hidrometri,
6. pelaksanaan ketatausahaan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan bantuan teknis pengelolaan sumber daya air kepada Kabupaten/ Kota, dan
7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dengan UPT WS

1.3 Sistematika

Sistematika Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, sebagai berikut:

- 1. Kata Pengantar.**
- 2. Daftar Isi.**
- 3. Bab I Pendahuluan.**

Bab ini menguraikan secara ringkas Latar Belakang penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur 2019, Gambaran umum organisasi, sistematika Laporan Reformasi Tahun 2019.

4. Bab II Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019.

Dalam bab ini menguraikan identifikasi permasalahan dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi.

5. Bab III Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019.

Bab ini menguraikan tentang Realisasi Capaian dan Analisis Evaluasi dan rencana tindak lanjut

6. Bab IV Penutup

Dalam bab penutup ini berisi simpulan dan rekomendasi.

BAB II

RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019

2.1 Isu Permasalahan

Reformasi birokrasi dan tata kelola tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang merupakan salah satu bagian dari prioritas pertama dari 11 prioritas nasional. Prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola menginginkan terjadinya pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum dan transparan. Hal tersebut didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah pusat dan daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai dan data kependudukan yang baik.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, reformasi birokrasi tertuang dalam Misi Keempat (Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik). Misi ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata pemerintahan yang bersih (clean government) serta profesionalisme pelayanan publik. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan keterampilan dan Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya serta optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masyarakat). Reformasi Birokrasi yang spesifik dengan karakteristik Jawa Timur ini diformulasikan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Good Government/} \\ \text{Refomasi Birokrasi} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Regulasi} \\ \text{(Reformasi} \\ \text{Administrasi)} \end{array} + \text{SDM} + \begin{array}{l} \text{Teknologi} \\ \text{Informasi} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Control} \\ \text{(Masyarakat)} \end{array}$$

Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses informasi publik akurat dan terkini.

2. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengamanan informasi.
3. Peningkatan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung sistem kearsipan yang komprehensif.
5. Peningkatan koordinasi integrasi dan sinkronisasi serta sinergi perencanaan pembangunan antar OPD.
6. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar
7. pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat
8. Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat.
9. Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
10. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu.
11. Peningkatan efisiensi dan efektifitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.
12. Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya.
13. Menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.
14. Peningkatan pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana alam.
15. Pemenuhan kebutuhan pada saat status darurat bencana yang pendanaannya dialokasikan khusus untuk BPBD yang dititipkan melalui dana BTT (BPKAD) dan pencairannya melalui SK Status Keadaan Darurat Bencana.
16. Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan.

Program unggulan yang mendukung Misi Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, difokuskan pada:

1. Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat untuk menghasilkan pelayan publik yang lebih jelas tolak ukurnya.
2. Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat.
5. Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung sistem kearsipan yang komprehensif.
6. Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolak ukurnya.
7. Peningkatan efisiensi dan efektifitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.
8. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan pelayanan standar minimal yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat
9. Peningkatan akses informasi publik secara akurat dan up to date (e-Government).
10. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas OPD.
11. Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan.
12. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu.
13. Peningkatan ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat up to date.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek

kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah di mana pengelolaan keuangan tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah tabel Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	61,04	63,00	65,00

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa Indeks Reformasi Birokrasi di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 63,00 meningkat pada tahun 2016 menjadi 65,00. Peningkatan ini mencerminkan bahwa birokrasi pemerintah Jawa Timur adalah birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

2.2 Rencana Kerja

Sesuai dengan amanat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), dan Road Map Reformasi Birokrasi 2019-2024 (Permenpan Nomor 11 Tahun 2015), Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur melaksanakan Reformasi Birokrasi secara berkesinambungan pada tahun 2019. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk menyempurnakan, menguatkan atau menata birokrasi melalui pelaksanaan atas 8 (delapan) program Reformasi Birokrasi terkait manajemen perubahan, sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara, peraturan perundang-undangan, dan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Rencana kerja Reformasi Birokrasi tersebut, dalam penyusunannya mempertimbangkan pelaksanaan program dan kegiatan

Reformasi Birokrasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai dengan program kerja dan tugas pokok serta fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan hasil yang diharapkan, Rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tahun 2019 memuat rencana atas 8 (delapan) area perubahan, yaitu manajemen perubahan, sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara, peraturan perundang-undangan, dan kualitas pelayanan publik. Berikut rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

2.2.1 Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)

Program manajemen perubahan merupakan area perubahan yang sangat penting dan mendasar dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna melakukan perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) individu atau unit kerja menjadi lebih baik sesuai tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Pada area ini, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019, adalah:

Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam penerapan Reformasi Birokrasi, melalui kegiatan:

1. Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi.
2. Penerapan sistem nilai (etika, perilaku, pola pikir dan budaya kerja) dalam peningkatan mutu kinerja dan pelayanan Dinas.
3. Penyusunan strategi manajemen perubahan.
4. Penyusunan strategi komunikasi manajemen perubahan.
5. Pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi.

2.2.2 Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Sasaran yang ingin dicapai pada area/program ini, antara lain:

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur melalui kegiatan Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan negara pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur telah sesuai aturan yang berlaku.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

2.2.3 Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja agar birokrasi berkinerja tinggi dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya. Sasaran dari area ini, antara lain:

1. Meningkatnya Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timurmelalui pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penerapan serta monitoring dan evaluasi atas Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Meningkatnya akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, dengan melaksanakan kegiatan:
3. Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja.
4. Mengembangkan, mereviu, dan memperbarui Renstra dengan memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan dan ketersediaan sumberdaya.
5. Pengelolaan akuntabilitas kinerja.

2.2.4 Penguatan Kelembagaan

Program penguatan kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelembagaan secara profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Adapun sasaran yang ingin dicapai dari area/program ini:

- a. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, melalui pelaksanaan kegiatan:
 1. Evaluasi kelembagaan.
 2. Penyempurnaan/penataan organisasi.

- b. Meningkatnya kapasitas Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dengan melakukan:
1. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, kepegawaian, kehumasan, dan diklat.
 2. Penyelenggaraan koordinasi antar unit kerja.
 3. Pengembangan dan pelaksanaan hubungan kemitraan utama/masyarakat.
 4. Pelaksanaan evaluasi terhadap ketepatan tugas dan fungsi serta ketepatan ukuran organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

2.2.5 Penataan Ketatalaksanaan

Program penataan ketatalaksanaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen organisasi di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Sasaran yang dicapai pada area/program ini:

1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan melakukan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi sesuai prosedur kerja yang telah diformalkan;
2. Meningkatnya kinerja di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

Upaya peningkatan penataan ketatalaksanaan di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, melalui pelaksanaan kegiatan:

1. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
2. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik melalui PPID.
3. Pengoptimalan peta proses bisnis dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
4. Implementasi dan evaluasi dari sistem dan prosedur kerja yang telah disusun.

2.2.6 Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi dan transparan. Sasaran yang ingin dicapai pada area/program ini, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan melakukan pengelolaan SDM yang mengacu pada peta, uraian, peringkat, dan kelas jabatan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, melalui pelaksanaan kegiatan:
 1. Pelaksanaan rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, dan akuntabel.
 2. Penyusunan pola karir pegawai, mutasi, dan promosi secara transparan/terbuka.
- c. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
- d. Meningkatnya efektivitas manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan melakukan:
 1. Pelaksanaan Penetapan Kinerja Individu.
 2. Penyusunan data pegawai yang mutakhir dan akurat.
- e. Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, melalui kegiatan:
 1. Penyempurnaan standar kompetensi jabatan.
 2. Penyusunan peta profil kompetensi individu.
 3. Penyusunan sistem dan proses diklat pegawai berbasis kompetensi.
 4. Penyempurnaan evaluasi jabatan.
 5. Pelaksanaan penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
 6. Pelaksanaan promosi jabatan terbuka.

- f. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, dengan melakukan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- g. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan melakukan:
 - 1. Penegakkan aturan disiplin dan kode etik.
 - 2. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian.
- h. Meningkatnya profesionalisme manajemen SDM Aparatur di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan melakukan pelaksanaan pengembangan pegawai berbasis kompetensi.

2.2.7 Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan instansi pemerintah. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini:

- 1. Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan melakukan kegiatan:
- 2. Pengklasifikasian dan pengadministrasian arsip dan indeks peraturan, baik internal maupun eksternal, agar lebih tertib, lengkap dan informatif, serta disosialisasikan ke pegawai dan stakeholder.
- 3. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur sebagai dasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi.

2.2.8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan melakukan

penyelenggaraan pelayanan publik yang terjangkau, pasti waktunya dan jelas prosedur pelayanannya.

2. Mengembangkan dan menyediakan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat/pengguna layanan, yaitu dengan melakukan:
 - a. Pelaksanaan berbagai upaya untuk mencegah, meminimalisasi dan menangkal terjadinya korupsi atau pemberian gratifikasi kepada pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
 - b. Pelibatan masyarakat/pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - c. Penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat/pengguna layanan
 - d. secara transparan untuk mempermudah pelayanan dan menghindari penggunaan calo.
 - e. Pemberian pelatihan pelayanan prima secara periodik kepada pegawai yang bertugas memberikan pelayanan.
 - f. Pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi interaksi antara pegawai dan masyarakat/pengguna layanan guna mencegah terjadinya gratifikasi.
 - g. Pengembangan sistem pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan yang dapat diakses melalui media elektronik/internet maupun melalui media kotak pengaduan.
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, yang dapat diketahui melalui pelaksanaan/pengimplementasian metode survei kepuasan pelanggan yang efektif.

Tabel 2.2 Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

NO	AREA PERUBAHAN			
	KOMPONEN	TUJUAN	SASARAN	KEGIATAN
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	Mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi.	Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam penerapan Reformasi Birokrasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem nilai (etika, perilaku, pola pikir dan budaya kerja) dalam peningkatan mutu kinerja dan pelayanan Dinas. 2. Penyusunan strategi manajemen perubahan. 3. Penyusunan strategi komunikasi manajemen perubahan. 4. Pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi. 5. Penetapan Tim RB tahun 2019. 6. Pemanfaatan berbagai media sebagai sarana komunikasi dan informasi terkait RB, contoh portal, website Dinas PU SDA, Sosialisasi. 7. Internalisasi nilai-nilai Kementerian secara terus menerus dengan optimalisasi peran agen perubahan
2	PENGUATAN PENGAWASAN	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang	1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Dinas	1. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

NO	AREA PERUBAHAN			
	KOMPONEN	TUJUAN	SASARAN	KEGIATAN
		bersih dan bebas KKN.	Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. 2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Dinas.	Provinsi Jawa Timur telah sesuai aturan yang berlaku. 2. Internalisasi/Sosialisasi/Public Campaign Penanganan Gratifikasi, Whistle Blowing System, Pengaduan Masyarakat dan Benturan Kepentingan
3	PENGUATAN AKUNTABILITAS	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja agar birokrasi berkinerja tinggi dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya	1. Meningkatnya kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. 2. Meningkatnya akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur	1. Menyusun indikator kinerja eselon III dan IV dan menuangkannya ke dalam SKP 2. Penyampaian pelaporan kinerja secara priodik berbasis online dan terintegrasi 3. Peningkatan sinergitas antar satker dalam budaya organisasi 4. Peningkatan kapasitas pengelola akuntabilitas kinerja di satuan kerja melalui rapat-rapat koordinasi 5. Membuat Pakta Integritas KPA dengan PPK 6. Review pasal-pasal kontrak SPM

NO	AREA PERUBAHAN			
	KOMPONEN	TUJUAN	SASARAN	KEGIATAN
				7. Membuat Reward/punishment pada pegawai yang melakukan penggaran dan berprestasi.
4	PENGUATAN KELEMBAGAAN	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelembagaan secara profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.	1. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Jawa Timur. 2. Meningkatnya kapasitas Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi.	1. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, kepegawaian, kehumasan, dan diklat. 2. Penyelenggaraan koordinasi antar unit kerja. 3. Pengembangan dan pelaksanaan hubungan kemitraan utama/masyarakat. 4. Pelaksanaan evaluasi terhadap ketepatan tugas dan fungsi serta ketepatan ukuran organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur 5. Internalisasi Struktur organisasi baru 6. penyusunan Anjab dan Evjab Struktur organisasi baru

NO	AREA PERUBAHAN			
	KOMPONEN	TUJUAN	SASARAN	KEGIATAN
5	PENATAAN KETATALAKSANAAN	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen organisasi di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur	1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. 2. Meningkatnya kinerja di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur	1. Monev Implementasi Peta Proses Bisnis Dinas PU SDA. 2. Implementasi dan Monev e-Government yang terintegrasi. 3. Survei Kepuasan implementasi e-Government. 4. Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui SPSE sesuai target Rencana Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi. 5. Pemenuhan kriteria keterbukaan informasi publik dalam hal transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas; 6. Survei Kepuasan Transparansi Informasi Publik. 7. Membuat SOP untuk seluruh kegiatan kegiatan.

NO	AREA PERUBAHAN			
	KOMPONEN	TUJUAN	SASARAN	KEGIATAN
6	PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi dan transparan	1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. 3. Meningkatkan disiplin SDM Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur 4. Meningkatkan efektivitas manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur 5. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia	1. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, kepegawaian, kehumasan, dan diklat. 2. Penyelenggaraan koordinasi antar unit kerja. 3. Pengembangan dan pelaksanaan hubungan kemitraan utama/masyarakat. 4. Pelaksanaan evaluasi terhadap ketepatan tugas dan fungsi serta ketepatan ukuran organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

NO	AREA PERUBAHAN			
	KOMPONEN	TUJUAN	SASARAN	KEGIATAN
7	PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan instansi pemerintah.	Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi, analisa, dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang Dinas PU SDA 2. Melakukan harmonisasi dan penyusunan terhadap regulasi 3. Melakukan FGD dan konsultasi publik melalui website untuk melibatkan publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan 4. Pemuktahiran Undang-undang di website Dinas PU SDA secara berkala
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur 2. Mengembangkan dan menyediakan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat/peng 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan masyarakat/pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Pemberian pelatihan pelayanan prima secara periodik kepada pegawai yang bertugas memberikan pelayanan. 3. Pengelolaan Pengaduan 1 pintu

NO	AREA PERUBAHAN			
	KOMPONEN	TUJUAN	SASARAN	KEGIATAN
			guna layanan.	4. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat 5. Pelayanan terintegrasi

BAB III

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019

3.1 Realiasi Capaian

Berdasar rencana kerja yang ditetapkan, sepanjang tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan penyempurnaan, penguatan atau penataan birokrasi melalui 8 (delapan) program Reformasi Birokrasi terkait manajemen perubahan, sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara, peraturan perundang-undangan, kualitas pelayanan publik, dan Quick Wins, guna mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Pelaksanaan program terkait 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tahun 2019 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang dapat menghasilkan pencapaian untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi. Secara singkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2019

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	OUTPUT
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Penerapan sistem nilai (etika, perilaku, pola pikir dan budaya kerja) dalam peningkatan mutu kinerja dan pelayanan Dinas. 2. Penyusunan strategi manajemen perubahan. 3. Penyusunan strategi komunikasi manajemen perubahan. 4. Pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi. 5. Penetapan Tim RB tahun 2019.	1. Pembentukan Tim RB melalui SK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas 2. Pembentukan Tim SPIP melalui SK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas 3. Membuat rencana kerja SPIP 4. Membuat rencana aksi RB berdasarkan Road Map RB Provinsi Jawa Timur

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	OUTPUT
		6. Pemanfaatan berbagai media sebagai sarana komunikasi dan informasi terkait RB, contoh portal, website Dinas PU SDA, Sosialisasi. 7. Internalisasi nilai-nilai Kementerian secara terus menerus dengan optimalisasi peran agen perubahan	
2	PENGUATAN PENGAWASAN	1. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur telah sesuai aturan yang berlaku. 2. Internalisasi/Sosialisasi/Public Campaign Penanganan Gratifikasi, Whistle Blowing	1. Membuat SOP Pengendali Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan. 2. Pembentukan Tim UPG melalui SK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas 3. Membuat rencana kerja pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan Whistle Blowing System
3	PENGUATAN AKUNTABILITAS	1. Menyusun indikator kinerja eselon III dan IV dan menuangkannya ke dalam SKP 2. Penyampaian pelaporan kinerja secara priodik berbasis online dan terintegrasi 3. Peningkatan sinergitas antar satker dalam budaya organisasi 4. Peningkatan kapasitas pengelola akuntabilitas kinerja di satuan kerja melalui rapat-rapat koordinasi 5. Membuat Pakta Integritas KPA dengan PPK 6. Review surat perjanjian untuk penyedia jasa	1. Membuat monitoring kinerja dengan menggunakan website E-Sakip oleh seluruh pegawai di Dinas PU SDA. 2. Membuat Pakta integritas KPA dengan PPK 3. Rapat kordinasi penyesuaian SKP 4. Membuat punishment untuk pegawai yang melanggar disiplin 5. Review kontrak dalam pasal 8 dalam SPM

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	OUTPUT
		7. Membuat Reward/punishment pada pegawai yang melakukan penggarahan dan berprestasi.	6. Menyusun peta Proses Bisnis
4	PENGUATAN KELEMBAGAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, kepegawaian, kehumasan, dan diklat. 2. Penyelenggaraan koordinasi antar unit kerja. 3. Pengembangan dan pelaksanaan hubungan kemitraan utama/masyarakat. 4. Pelaksanaan evaluasi terhadap ketepatan tugas dan fungsi serta ketepatan ukuran organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur 5. Internalisasi Struktur organisasi baru 6. penyusunan Anjab dan Evjab Struktur organisasi baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perjanjian kinerja Kepala Dinas PU Sumber Daya Air dengan Gubernur Jawa Timur Tahun 2019 2. Rapat Koordinasi penyusunan SKP dengan BKD. 3. Laporan Anjab dan Evjab 4. Cascading Peta Proses Bisnis 5. Mengikut sertakan staff untuk Bintek dan Diklat kepegawaian.
5	PENATAAN KETATALAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monev Implementasi Peta Proses Bisnis Dinas PU SDA. 2. Implementasi dan Monev e-Government yang terintegrasi. 3. Survei Kepuasan implementasi e-Government. 4. Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui SPSE sesuai target Rencana Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi. 5. Pemenuhan kriteria keterbukaan informasi publik dalam hal transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan menginventarisasi SOP untuk seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PU SDA. 2. Membuat website, media sosial, untuk keterbukaan informasi publik secara up to date. 3. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui SPSE sesuai target rencana aksi pencegahan pemberantasan korupsi.

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	OUTPUT
		6. Survei Kepuasan Transparansi Informasi Publik. 7. Membuat SOP untuk seluruh kegiatan	
6	PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, kepegawaian, kehumasan, dan diklat. 2. Penyelenggaraan koordinasi antar unit kerja. 3. Pengembangan dan pelaksanaan hubungan kemitraan utama/masyarakat. 4. Pelaksanaan evaluasi terhadap ketepatan tugas dan fungsi serta ketepatan ukuran organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur	1. Mengikut sertakan CPNS dalam Diklat SAR dan Diklat Keuangan. 2. Melakukan ANJAB dan Evjab 3. Membuat laporan Tribulan Indikator Kinerja Individu PNS 4. Membuat unit PPID
7	PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1. Inventarisasi, analisa, dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang Dinas PU SDA 2. Melakukan harmonisasi dan penyusunan terhadap regulasi 3. Melakukan FGD dan konsultasi publik melalui website untuk melibatkan publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan 4. Pemuktahiran Undang-undang di website Dinas PU SDA secara berkala	1. Melakukan evaluasi dan harmonisasi dalam penyusunan regulasi sesuai dengan peraturan terbaru. 2. Melakukan sosialisasi undang-undang terbaru kepada seluruh unit kerja Dinas PU SDA. 3. Upload Undang-undang terbaru di website resmi Dinas PU SDA secara up to date.
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	1. Pelibatan masyarakat/pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.	1. Membuat Unit PPID yang bertempat di Lt 1 Dinas PU SDA 2. Membuat Website, media sosial, dan youtube untuk

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	OUTPUT
		2. Penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat/pengguna layanan secara transparan untuk mempermudah pelayanan dan menghindari penggunaan calo. 3. Pemberian pelatihan pelayanan prima secara periodik kepada pegawai yang bertugas memberikan pelayanan. 4. Pengelolaan Pengaduan 1 pintu 5. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat 6. Pelayanan terintegrasi	pelayanan dan informasi publik. 3. Memberikan pengarahan dan mengikutsertakan staff sebagai Admin Website CETTAR 4. Membuat kolom saran dan kritik pada Website Dinas PU SDA 5. Pengaduan 1 pintu melalui PPID 6. Menyusun SOP pengaduan masyarakat

3.2 Evaluasi Dan Rencana Tindak Lanjut

3.2.1 Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi, perubahan pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan) dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal tersebut dicapai melalui peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai dalam penerapan Reformasi Birokrasi. Dalam tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya, antara lain:

1. Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tahun 2019.
2. Percepatan pelaksanaan program sebagaimana disusun dalam rencana kerja, dengan perumusan program percepatan (Quick Wins) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
3. Penerapan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk dari Pelaksanaan dan

Pengembangan Budaya Kerja yang Profesional, Akuntabel dan Tanggap dalam bekerja sama dan berkoordinasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

3.2.2. Penguatan Pengawasan

Dalam rangka Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, Penguatan pengawasan terkait kegiatan Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Dalam tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya, antara lain:

1. Pembuatan Rencana Kerja Unit Pengendali Gratifikasi dan rencana kerja *Whistle Blowing System*



Gambar 3.1 Renja UPG dan Sosialisasi tentang Gratifikasi

3.2.3 Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja agar birokrasi berkinerja tinggi dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya terkait Penguatan Akuntabilitas Kinerja, pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timurtelah melakukan upaya, antara lain:

1. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 yang melibatkan jajaran pimpinan di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.



Gambar 3.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, dengan melakukan kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Gambar 3.3 LKJIP Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

3. Penyusunan Teknokratik Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, dan penyusunan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang direvisi sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 103 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang melibatkan jajaran struktural.

3.2.4 Penguatan Kelembagaan

Dalam rangka penguatan kelembagaan melalui penurunan tumpang tindih tugas dan fungsi internal dan peningkatan kapasitas Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi, pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur melakukan program dan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

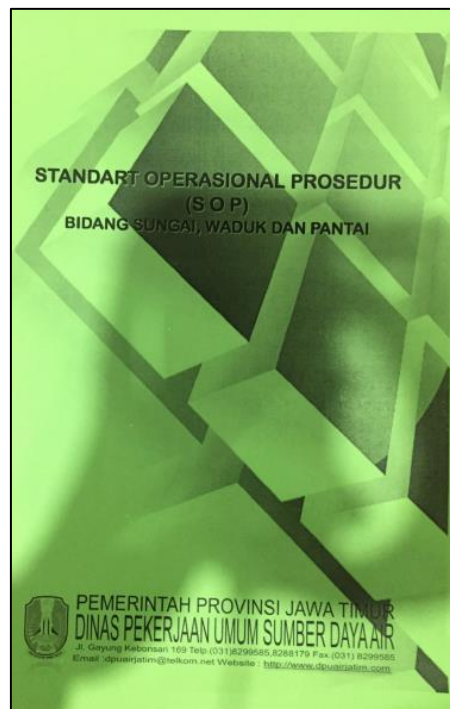
1. Pelaksanaan Evaluasi kelembagaan melalui Rapat Evaluasi terkait perubahan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur 103 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
2. Pembuatan peta bisnis proses pada unit eselon II, eselon III, eselon IV dan staf.
3. Pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan terhadap SOP yang ada.

3.2.5 Penataan Ketatalaksanaan

Guna mewujudkan hasil yang diharapkan pada bidang ini yakni peningkatan efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan serta peningkatan kinerja di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2019 telah dilakukan perbaikan dan pembenahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penetapan, penerapan, dan evaluasi atas Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Utama, melalui kegiatan:

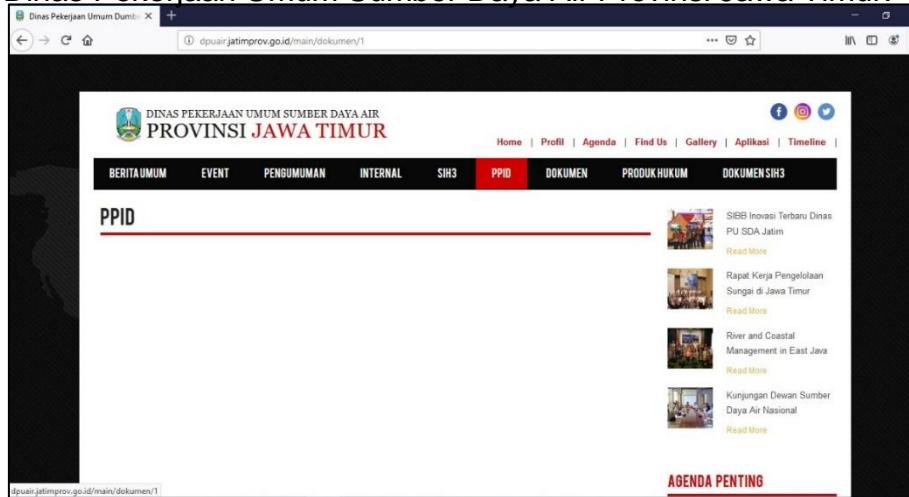
2. Penyusunan peta proses bisnis, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur berdasar Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
3. Penerapan SOP di seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
4. Pelaksanaan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas alur proses bisnis dan SOP secara berkala sesuai dengan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.



Gambar 3.4 SOP Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur (SWP)

1. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
2. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik melalui website PPID (www.dpuair.jatimprov.go.id) yang terintegrasi dengan website

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.



Gambar 3.5 Website PPID Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

3.2.6 Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada program penguatan

sistem manajemen SDM ASN, yakni untuk peningkatan profesionalisme SDM aparatur yang didukung sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi dan transparansi, sepanjang tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi, melalui upaya:
2. Penyusunan analisis jabatan.
3. Perhitungan beban kerja.
4. Perhitungan kebutuhan pegawai.
5. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan.
6. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan.
7. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan.
8. Penetapan Kinerja Individu, dilakukan dengan menciptakan kondisi:
9. Penerapan Penetapan kinerja individu melalui SKP (Sasaran Kerja Pegawai).
10. Pelaksanaan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi melalui SKP.

11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu, melalui review prestasi kerja.

3.3.7 Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Pada Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timurmelakukan program dan kegiatan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur secara tertib, lengkap, informatif, melalui beberapa kegiatan antara lain:

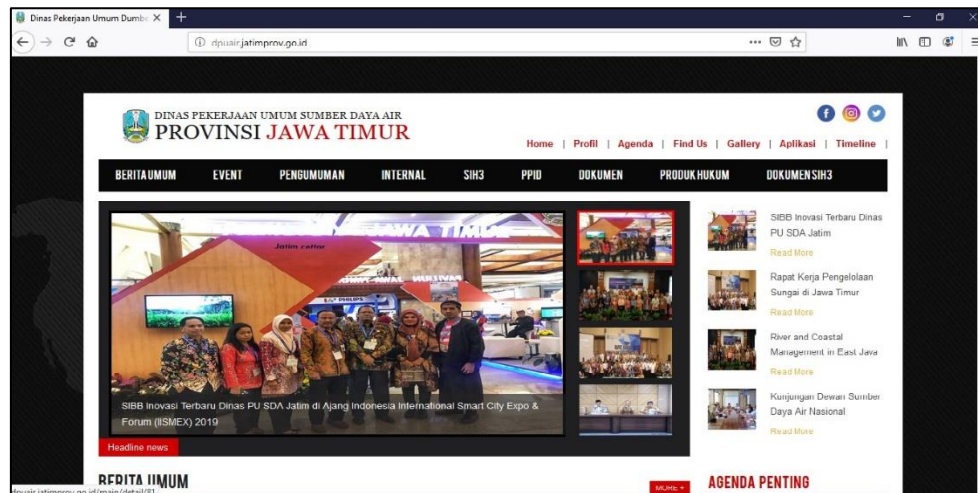
1. Pengklasifikasian dan pengadministrasian arsip dan indeks peraturan, baik internal maupun eksternal, agar lebih tertib, lengkap dan informatif, serta disosialisasikan ke pegawai dan stakeholder yang dilakukan oleh petugas Pengolah Perundang-Undangan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran.
2. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur sebagai dasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi yang dilakukan oleh petugas Pengolah Perundang-Undangan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran.

3.2.8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepadapublik (stakeholders terkait) secara lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau, pengembangan dan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat (stakeholders terkait) atas pelayanan yang diberikan, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur melakukan upaya sebagai berikut:

1. Guna mendukung pelayanan, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur melaksanakan reviu atas Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dari hasil reviu tersebut, disusun revisi Standar Operasional Prosedur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
2. Pengembangan sarana layanan yang terpadu/terintegrasi dan inovatif, melalui:

- a. Penyediaan Media Komunikasi Layanan Informasi di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, dengan memanfaatkan baik website (www.dpuair.jatimprov.go.id) maupun media sosial seperti twitter dan facebook.



Gambar 3.6 Website Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur



Gambar 3.7 Instagram Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur



Gambar 3.8 Twitter Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

- b. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tahun 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/14/KPTS/105/2018 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.

3.3 Analisis Hasil

Dalam melaksanakan 8 (delapan) program yang merupakan komponen pengungkit sebagaimana diuraikan di atas dimaksudkan untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi, antara lain:

1. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (stakeholders terkait).
2. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.
3. Keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 dapat dilihat

dari pengukuran atas aspek yang ditetapkan dalam Sasaran Reformasi Birokrasi, sebagai berikut:

3.3.1 Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN

Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan beberapa hal terkait upaya peningkatan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan, evaluasi terhadap penanganan pengaduan masyarakat serta tindak lanjut, serta menciptakan kualitas dan kuantitas SDM pengawas/verifikator keuangan intern dalam rangka menciptakan pengendalian internal yang memadai. Hasil dari pelaksanaan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dapat dilihat dari menurunnya temuan/evaluasi keuangan oleh Inspektorat Daerah maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018.

3.3.2 Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Pelayanan publik pada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur diantaranya adalah pelayanan pengujian bahan bangunan dan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh Laboratorium Perumahan dan Permukiman UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman. Untuk mendapatkan feedback dari masyarakat yang menjadi pengguna layanan pengujian bahan bangunan serta masyarakat umum yang mendapatkan layanan informasi bahan bangunan, UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman melakukan survey mandiri untuk memperoleh indikator indeks kepuasan layanan informasi dan pengujian. Pada tahun 2018, hasil survei atas kepuasan stakeholder terhadap pelayanan dalam kategori “baik” dengan besaran nilai indeks kepuasan layanan informasi dan pengujian sebesar 78. Hasil ini dapat dijadikan sebagai salah satu gambaran atas kepuasan stakeholder terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur melalui UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman.

3.3.3 Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, dengan menggunakan ukuran Nilai akuntabilitas kinerja. Pengukuran dengan menggunakan ukuran nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dari Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tahun 2019 oleh Tim Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Timur, dari hasil tersebut didapat gambaran tingkat efektivitas akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Berdasar hasil penilaian tahun 2017 oleh Tim Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai 82,97 atau predikat A dengan interpretasi Memuaskan. Penilaian tersebut menunjukkan

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 ditujukan untuk mewujudkan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur berbasis kinerja secara bertahap dan berkesinambungan, dalam pelaksanaannya berdasar rencana kerja yang mencakup 9 (sembilan) program terkait 8 (delapan) area perubahan, yakni manajemen perubahan, sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem manajemen SDM ASN, peraturan perundang-undangan, kualitas pelayanan publik, dan Quick Wins. Guna mengetahui perkembangan dan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan penilaian secara internal. Penilaian secara internal dengan mengadakan, antara lain survei secara mandiri terhadap opini atas kepuasan/kemanfaatan layanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Dari penilaian internal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dapat memetakan permasalahan yang dihadapi serta solusi dalam mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi.

4.2 Rekomendasi

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di setiap area perubahan, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur perlu menindaklanjuti saran perbaikan baik yang terdapat dalam hasil survei internal.
2. Selanjutnya, seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur perlu memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur berbasis kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.